

Strategi Integrasi Sektor Pertanian dan Perdagangan dalam Pengembangan Kluster Ekonomi Inklusif Kota Sungai Penuh

(Strategy for Integrating the Agricultural and Trade Sectors in the Development of Inclusive Economic Clusters in Sungai Penuh City)

Rafmil Kurniawan^{1*}

Pemerintah Kota Sungai Penuh, Jambi, Indonesia¹

rafmilkurniawan@gmail.com¹



Riwayat Artikel

Diterima pada 16 Desember 2025
Revisi 1 pada 23 Desember 2025
Revisi 2 pada 30 Desember 2025
Revisi 3 pada 09 Januari 2026
Disetujui pada 19 Januari 2026

Abstract

Purpose: This study aims to formulate an integrated economic policy strategy to promote inclusive and sustainable economic growth in Sungai Penuh City through sectoral integration between agriculture and trade.

Research methodology: The study applies an applied policy research approach using secondary data from Statistics Indonesia (BPS), regional planning documents, and local government reports (2020–2024). The analysis includes regional economic assessment, trend analysis, value chain analysis of agriculture–trade linkages, policy evaluation, and comparative analysis of policy alternatives.

Results: Agriculture and trade contribute over 40 percent of regional GDP but remain characterized by low productivity and limited value added. Economic growth has not been fully inclusive, as indicated by slow poverty reduction and persistent income inequality. Existing policies are fragmented and sectoral, limiting effective integration among agriculture, trade, and MSMEs. The development of inclusive agricultural–trade economic clusters emerge as the most strategic policy option to strengthen value chains, enhance productivity, expand employment, and improve income distribution.

Conclusions: Inclusive and sustainable economic growth in Sungai Penuh City requires an integrated economic policy framework that strengthens sectoral linkages and supports local economic transformation.

Limitations: This study relies solely on secondary data without primary or micro-level analysis.

Contributions: This study provides an evidence-based policy framework for designing integrated and inclusive regional economic development strategies in non-metropolitan areas.

Keywords: *Agriculture, Economic Policies, Trade Sector*

How to Cite: Kurniawan, R. (2026). Strategi Integrasi Sektor Pertanian dan Perdagangan dalam Pengembangan Kluster Ekonomi Inklusif Kota Sungai Penuh. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 5(2), 35-54

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan. Namun, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada besaran *output*, tetapi juga perlu mempertimbangkan struktur ekonomi, distribusi

pendapatan, serta kondisi ketenagakerjaan. Dalam literatur pembangunan, pertumbuhan ekonomi inklusif dipahami sebagai pertumbuhan yang disertai perluasan kesempatan ekonomi dan distribusi manfaat yang lebih setara ([Rauniyar & Kanbur, 2009](#); [Setyohadi, PD, & Tjitrosumarto, 2025](#)).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menurunkan kemiskinan dan ketimpangan apabila tidak disertai transformasi struktural dan penyerapan tenaga kerja produktif. [Wahyudi and Silpayana \(2022\)](#) menunjukkan bahwa struktur tenaga kerja dan karakteristik sektor dominan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, [Hardana, Nasution, Damisa, Lestari, and Zein \(2023\)](#) menunjukkan bahwa tanpa penguatan sektor produktif, pertumbuhan tidak secara signifikan menurunkan kemiskinan. Lembaga internasional seperti [W. Bank \(2022\)](#); [OECD \(2023\)](#) juga menekankan pentingnya integrasi antar sektor ekonomi untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan.

Dalam konteks Kota Sungai Penuh, struktur perekonomian periode 2020–2024 masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan besar dan eceran. Data Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa sektor pertanian berkontribusi sekitar 22–23 persen dan sektor perdagangan sekitar 18–19 persen terhadap PDRB. Secara agregat, kedua sektor tersebut menyumbang lebih dari 40 persen PDRB daerah dan menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dari sisi struktural, sektor pertanian masih didominasi kegiatan produksi primer dengan nilai tambah terbatas, tercermin dari kontribusi industri pengolahan yang hanya sekitar 7 persen terhadap PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi struktural dan integrasi hulu–hilir belum berjalan optimal ([Dethier & Effenberger, 2012](#)).

Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan yang bersumber dari sektor pertanian cenderung lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan dari sektor non-pertanian, terutama bagi kelompok miskin di wilayah berpendapatan rendah, karena tingginya partisipasi rumah tangga miskin dalam aktivitas pertanian dan besarnya peran sektor ini dalam perekonomian daerah ([Christiaensen, Demery, & Kuhl, 2011](#)). Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pengembangan pertanian berkelanjutan yang didukung inovasi teknologi dan penguatan kapasitas petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat desa. [Nasihin et al. \(2025\)](#) menunjukkan bahwa pendekatan pertanian berkelanjutan tidak hanya meningkatkan output pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Temuan ini relevan sebagai dasar penguatan kebijakan pertanian bernilai tambah di Kota Sungai Penuh.

Dalam konteks ekonomi lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sektor pertanian dan perdagangan. UMKM berperan dalam pengolahan hasil pertanian, distribusi produk, serta pemasaran ke pasar lokal dan regional, sehingga memperkuat rantai nilai dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan UMKM berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan ekonomi, terutama di wilayah non-metropolitan ([Suci, Dilla Amelia, Muhammad, & Lokot Muda, 2025](#); [Wiranata, Efendi, & Sari, 2024](#)).

Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi penguatan peran UMKM dalam perekonomian daerah. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa rendahnya inklusi keuangan menyebabkan UMKM sulit meningkatkan skala usaha, produktivitas, serta keterkaitannya dengan sektor pertanian dan perdagangan. Di Indonesia, kesehatan sektor perbankan dan ketersediaan kredit terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan UMKM, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selain itu, peningkatan akses tabungan dan dana pihak ketiga juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di tingkat regional ([Zahra & Ajija, 2023](#); [Gustriani, Asngari, Suhel, & Yulianita, 2023](#); [Purnamasari, Seprillina, Qurrata, Sarmidi, & Cahayati, 2025](#)).

Dalam konteks pembangunan daerah, integrasi kebijakan sektor pertanian dan perdagangan menjadi krusial untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. [Padmayoni, Widanti, and Dewi \(2025\)](#) menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor

dalam pengelolaan pangan, distribusi, dan stabilisasi harga mampu melindungi kelompok berpendapatan rendah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Temuan ini memperkuat urgensi penguatan keterkaitan hulu–hilir antara sektor pertanian dan perdagangan dalam kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa penguatan UMKM melalui digitalisasi pemasaran dan pendampingan usaha berperan signifikan dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal serta memperluas akses pasar. [Putri, Suningsih, Karim, and Hendrawaty \(2023\)](#) mengemukakan bahwa penerapan pemasaran digital pada UMKM dan BUMDes mampu meningkatkan kinerja usaha dan keberlanjutan ekonomi lokal. Selain itu, [Ariandi \(2025\)](#) menegaskan bahwa pendampingan strategi pemasaran berbasis digital secara terstruktur meningkatkan efektivitas penjualan UMKM dan daya saing ekonomi daerah.

Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi pada peningkatan output agregat tanpa pemerataan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. [Ammi, Putri, Aldi, and Fahrur \(2024\)](#) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif mencakup perluasan partisipasi ekonomi berbagai kelompok masyarakat dan peningkatan kesejahteraan kelompok marginal melalui peningkatan akses terhadap peluang ekonomi dan sumber daya. Pendekatan inklusif menuntut identifikasi subsektor unggulan yang memiliki potensi besar dalam memperluas kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. [Rustiadi \(2025\)](#) menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan dan hortikultura memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat regional. Temuan ini relevan dengan karakteristik ekonomi Kota Sungai Penuh yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian.

Meskipun kajian tentang pertumbuhan inklusif telah banyak dilakukan pada level nasional dan provinsi, masih terbatas studi yang secara simultan mengintegrasikan analisis struktur PDRB sektoral, struktur ketenagakerjaan, kemiskinan, dan ketimpangan pada tingkat kota agraris non-metropolitan seperti Kota Sungai Penuh. Kesenjangan ini penting untuk diatasi mengingat pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stabil belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Berdasarkan kondisi tersebut, *policy paper* ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor struktural yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum inklusif; (2) mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi periode 2021–2024; dan (3) merumuskan alternatif kebijakan terintegrasi berbasis rantai nilai untuk memperkuat sektor pertanian dan perdagangan dengan dukungan UMKM. Secara konseptual dan operasional, kajian ini mengembangkan Model Klaster Ekonomi Inklusif Berbasis Rantai Nilai Lokal sebagai kerangka integratif untuk mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Metodologi

Policy paper ini menggunakan pendekatan kajian kebijakan pembangunan daerah dengan metode analisis deskriptif–evaluatif (*applied policy research*) untuk menganalisis kondisi perekonomian Kota Sungai Penuh, mengevaluasi kebijakan periode 2020–2024, serta merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hingga 2029 sesuai RPJMD. Unit analisis mencakup kinerja ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian dan perdagangan.

Data yang digunakan terutama berupa data sekunder dari BPS dan dokumen perencanaan daerah, yang dilengkapi dengan data primer kualitatif terbatas untuk memperkuat validitas analisis. Keterbatasan utama data sekunder terletak pada sifatnya yang agregat dan belum sepenuhnya menangkap dinamika mikro serta kendala implementasi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fenomena Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian Kota Sungai Penuh periode 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, namun belum diikuti perubahan struktur ekonomi yang signifikan. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, sektor pertanian dan perdagangan secara konsisten menyumbang lebih dari 40 persen

PDRB, sementara kontribusi industri pengolahan tetap rendah (sekitar 7 persen). Pola ini menandakan bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer dan perdagangan tradisional, dengan diversifikasi dan peningkatan nilai tambah yang terbatas.

Dominasi sektor primer yang berlangsung lama sering dikaitkan dengan stagnasi produktivitas dan rendahnya kualitas pertumbuhan apabila tidak disertai transformasi struktural ([Andriansyah, Nurwanda, & Rifai, 2023](#); [Halim, Yusuf, Sumner, & Purnagunawan, 2025](#); [Jui, 2025](#); [Yusuf, Anglingkusumo, & Sumner, 2021](#)). Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi struktural tidak berlangsung secara mekanis, melainkan dipengaruhi oleh proses evolusioner yang mencakup kesiapan teknologi, kapasitas kelembagaan ([Chizaryfard, Trucco, and Nuur \(2021\)](#)), serta keterkaitan antar sektor ekonomi sebagaimana juga ditegaskan oleh laporan lembaga internasional [A. D. Bank \(2023\)](#) dan [W. Bank \(2022\)](#), seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh menurut lapangan usaha utama tahun 2020–2024 (%)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,4	23,1	22,8	22,4	22,1	22,8
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,2	18,5	19	19,3	19,6	18,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,1	10	9,8	9,6	9,5	9,8
Jasa Pendidikan dan Kesehatan	8,9	9,1	9,2	9,4	9,6	9,2
Industri Pengolahan	7,4	7,3	7,2	7,1	7	7,2
Lainnya	32	32	32	32,2	32,2	32,1

Tabel 1 di atas mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum ditopang oleh proses diversifikasi sektor atau peningkatan nilai tambah yang memadai. Literatur pembangunan menegaskan bahwa tanpa transformasi struktural yang mendorong pergeseran aktivitas ekonomi menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi daerah cenderung bersifat rentan dan kurang inklusif ([Kazembe, Chomachoma, Nkoa, & Kelly, 2026](#); [Wu & Cai, 2025](#)).

Dominasi sektor primer yang belum disertai dengan transformasi struktural dan peningkatan produktivitas lintas sektor berimplikasi pada terbatasnya kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Studi kebijakan dan empiris menunjukkan bahwa wilayah yang bergantung pada sektor bernilai tambah rendah cenderung mengalami stagnasi produktivitas apabila tidak didukung oleh integrasi kebijakan pembangunan dan penguatan keterkaitan antar sektor ekonomi ([A. D. Bank, 2023](#); [W. Bank, 2022](#)).

Di sisi lain, peran UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal belum optimal akibat lemahnya kelembagaan usaha, keterbatasan akses pembiayaan, serta rendahnya integrasi dengan rantai nilai pertanian dan perdagangan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan UMKM, penyediaan layanan pengembangan usaha, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi merupakan prasyarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat regional ([Farida, 2025](#); [Kusumawardhani, Wulandari, Amriadi, Kasmirandi, & Abbas, 2025](#)). Selain itu, komposisi tenaga kerja semakin memperkuat gambaran ketergantungan terhadap sektor tradisional. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja 2024, sekitar 35 persen penduduk bekerja di sektor pertanian dan sekitar 25 persen di sektor perdagangan, sementara sektor industri dan jasa modern hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Tingginya konsentrasi tenaga kerja pada sektor-sektor

berproduktivitas rendah merupakan ciri umum daerah yang belum mengalami transformasi struktural, serta berimplikasi pada rendahnya pendapatan dan terbatasnya mobilitas ekonomi masyarakat ([Haile, 2025](#); [Mamman & Sohag, 2023](#)).

Dari sisi sosial ekonomi, rasio gini Kota Sungai Penuh berada pada kisaran 0,34–0,36, sementara tingkat kemiskinan masih sekitar 4 persen. Meskipun capaian ini relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi, indikator tersebut menunjukkan kecenderungan stagnasi dalam lima tahun terakhir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi perubahan struktur ekonomi dan peningkatan produktivitas lintas sektor cenderung gagal menurunkan ketimpangan pendapatan secara signifikan ([Henson, 2025](#); [Karimu & Abubakar, 2025](#)).

Tabel 2. Rasio gini dan tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh tahun 2020–2025

Tahun	Rasio Gini	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)
2020	0,351	5,63	4,70
2021	0,347	5,42	4,55
2022	0,342	5,21	4,40
2023	0,338	5,08	4,32
2024	0,336	4,95	4,25

Secara keseluruhan, fenomena ekonomi Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih bersifat kuantitatif dan belum sepenuhnya berkualitas. Ketergantungan pada sektor pertanian dan perdagangan tradisional, rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan, serta tingginya konsentrasi tenaga kerja pada sektor berproduktivitas rendah mengindikasikan bahwa transformasi struktural ekonomi daerah belum berjalan optimal. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi lintas negara dan regional yang menegaskan bahwa tanpa kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi daerah akan sulit bersifat inklusif dan berkelanjutan ([Andriansyah et al., 2023](#); [Sen, Sumner, & Yusuf, 2020](#); [Yusuf et al., 2021](#)).

Berdasarkan kondisi faktual dan analisis tren ekonomi di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang relevan dengan arah kebijakan penguatan sektor pertanian dan perdagangan di Kota Sungai Penuh, yaitu Pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh belum inklusif karena pertumbuhan PDRB belum diikuti pemerataan kesejahteraan. Produktivitas pertanian rendah akibat minim inovasi dan hilirisasi, sementara perdagangan terkonsentrasi di pusat kota. UMKM masih didominasi usaha mikro dengan akses pembiayaan dan literasi digital terbatas. Keterbatasan infrastruktur, logistik, dan koordinasi lintas sektor memperlemah integrasi rantai nilai ekonomi daerah.

Isu-isu strategis tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan ekonomi daerah bersifat struktural dan saling terkait, mencakup keterbatasan produktivitas sektor dominan, lemahnya nilai tambah ekonomi lokal, serta belum optimalnya integrasi kebijakan lintas sektor. Literatur kebijakan pembangunan regional menegaskan bahwa tanpa pendekatan kebijakan terintegrasi dan berbasis transformasi struktural, pertumbuhan ekonomi daerah cenderung tidak inklusif dan sulit memberikan dampak kesejahteraan yang merata ([OECD, 2023](#)).

Isu-isu di atas sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029, yaitu:

- 1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
- 2). Mengembangkan potensi unggulan daerah, khususnya pertanian, perdagangan, dan pariwisata.
- 3). Meningkatkan daya saing UMKM dan wirausaha lokal.
- 4). Memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan wilayah.

3.2 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

Tujuan utama dari kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kota Sungai Penuh melalui penguatan dan integrasi sektor pertanian dan perdagangan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin pada peningkatan PDRB, tetapi juga berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, ditetapkan beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, adopsi teknologi pertanian modern, dan penguatan sistem pascapanen serta pemasaran hasil pertanian.
- 2). Mendorong penguatan sektor perdagangan daerah, khususnya perdagangan besar, eceran, dan logistik berbasis potensi lokal yang mendukung rantai pasok pertanian.
- 3). Meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM, melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta digitalisasi perdagangan lokal.
- 4). Memperkuat infrastruktur ekonomi lokal seperti pasar, gudang, jalan produksi, dan fasilitas logistik untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah.
- 5). Meningkatkan pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan sektor informal, melalui integrasi pertanian–perdagangan yang inklusif.

Sasaran kebijakan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator ekonomi makro daerah dan target pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kota Sungai Penuh 2025–2029, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran pembangunan ekonomi inklusif Kota Sungai Penuh

No	Indikator	Kondisi 2024 (Baseline)	Target 2029	Keterangan / Arah Kebijakan
1	Laju pertumbuhan ekonomi daerah (%)	4,8	$\geq 6,0$	Penguatan sektor unggulan pertanian dan perdagangan
2	Tingkat kemiskinan (%)	5	$\leq 3,5$	Inklusivitas pertumbuhan melalui perluasan lapangan kerja
3	Rasio Gini	0,34	$\leq 0,32$	Pengurangan kesenjangan pendapatan antarwilayah
4	Kontribusi sektor pertanian & perdagangan terhadap PDRB (%)	42	$\geq 45,0$	Peningkatan nilai tambah dan rantai pasok ekonomi
5	Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian (Rp/juta per pekerja)	21	≥ 28	Adopsi teknologi & modernisasi pertanian
6	Jumlah UMKM aktif (unit)	7.000	≥ 10.000	Penguatan akses permodalan & digitalisasi
7	Nilai ekspor komoditas unggulan daerah (miliar Rp)	12	≥ 20	Diversifikasi dan promosi perdagangan luar daerah

3.3 Hubungan Tujuan Kebijakan dengan Agenda Pembangunan Daerah dan Nasional

Untuk menunjukkan keselarasan tujuan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif Kota Sungai Penuh dengan agenda pembangunan daerah, nasional, dan global, hubungan tersebut dipetakan secara ringkas dan sistematis dalam Tabel 4.

Tabel 4 Pemetaan hubungan tujuan kebijakan dengan agenda pembangunan daerah, nasional, dan global

Aspek Kebijakan	RPJMD Kota Sungai Penuh 2025–2029	RPJMN 2025–2029	SDGs	Implikasi Kebijakan Daerah
Penguatan sektor pertanian sebagai sektor basis ekonomi daerah	Misi Kedua: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Prioritas Nasional 2: Transformasi ekonomi berdaya saing	SDG 8 (<i>Decent Work and Economic Growth</i>)	Peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi produksi, dan penguatan nilai tambah komoditas unggulan lokal
Integrasi sektor pertanian dan perdagangan	Sasaran peningkatan daya saing ekonomi daerah dan pemerataan antarwilayah	Transformasi struktur ekonomi berbasis rantai nilai	SDG 8 & SDG 9 (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>)	Pengembangan rantai nilai pertanian–perdagangan dan kluster ekonomi lokal
Penguatan UMKM dan ekonomi rakyat	Peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha lokal	Penguatan ekonomi rakyat dan UMKM	SDG 8 & SDG 10 (<i>Reduced Inequalities</i>)	Perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan digitalisasi UMKM
Pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan	Pengurangan kesenjangan wilayah dan kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan	SDG 10 (<i>Reduced Inequalities</i>)	Penciptaan lapangan kerja berbasis sektor riil dan ekonomi lokal
Peningkatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi	Penguatan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi	Penguatan konektivitas dan logistik nasional	SDG 9 & SDG 11 (<i>Sustainable Cities and Communities</i>)	Revitalisasi pasar, jalan produksi, dan fasilitas logistik pertanian
Koordinasi lintas sektor dan kelembagaan	Tata kelola pembangunan daerah yang efektif	Reformasi birokrasi dan perencanaan terintegrasi	SDG 16 (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>)	Sinkronisasi program OPD dan penguatan perencanaan berbasis bukti

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan penguatan sektor pertanian dan perdagangan di Kota Sungai Penuh tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan nasional dan agenda pembangunan global. Pemetaan ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi inklusif yang diusulkan memiliki landasan perencanaan yang kuat, baik dari sisi visi daerah, prioritas nasional, maupun target pembangunan berkelanjutan, sehingga layak dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan lintas sektor.

3.4 Arah Umum Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi yang telah dirumuskan, arah kebijakan pembangunan ekonomi inklusif Kota Sungai Penuh diarahkan untuk menjawab permasalahan struktural perekonomian daerah sekaligus mengoptimalkan potensi sektor unggulan lokal. Pertama, transformasi struktur ekonomi daerah dari ekonomi berbasis sektor primer menuju ekonomi bernilai tambah tinggi menjadi arah kebijakan utama. Selama ini, perekonomian Kota Sungai Penuh masih didominasi oleh aktivitas pertanian primer dan perdagangan tradisional dengan nilai tambah yang terbatas. Oleh karena itu, kebijakan diarahkan pada penguatan hilirisasi pertanian, pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah, serta peningkatan kapasitas pengolahan hasil pertanian.

Kedua, integrasi rantai nilai pertanian dan perdagangan melalui penguatan kluster ekonomi lokal menjadi instrumen utama dalam mendorong ekonomi inklusif. Pendekatan kluster memungkinkan keterkaitan yang lebih erat antara petani, UMKM pengolahan, pedagang, dan pelaku logistik dalam satu sistem ekonomi. Ketiga, peningkatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi lokal diarahkan untuk memperlancar arus barang, jasa, dan informasi antarwilayah di Kota Sungai Penuh. Keterbatasan infrastruktur jalan produksi, pasar, fasilitas penyimpanan, dan logistik.

Keempat, pemberdayaan UMKM dan ekonomi rakyat diarahkan agar pelaku usaha lokal menjadi aktor utama dalam sistem ekonomi inklusif. UMKM diposisikan sebagai penghubung strategis antara sektor pertanian dan perdagangan, sekaligus sebagai motor penciptaan lapangan kerja. Kelima, peningkatan kolaborasi multipihak menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan kebijakan ekonomi inklusif. Pengembangan ekonomi daerah tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

3.5 Analisis Situasi dan Akar Masalah

3.5.1 Kondisi Ketenagakerjaan dan Produktivitas

Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap lebih dari sepertiga tenaga kerja Kota Sungai Penuh, diikuti oleh sektor perdagangan dengan sekitar seperempat dari total tenaga kerja. Namun, tingkat produktivitas dan upah rata-rata di kedua sektor ini masih tergolong rendah dibanding sektor formal lainnya. Hal ini mencerminkan kualitas pertumbuhan yang belum inklusif, di mana sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor berpendapatan rendah.

Tabel 5. Distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha (2024)

Lapangan Usaha	Persentase Tenaga Kerja (%)	Rata-Rata Upah Bulanan (Rp)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	35	1.850.000
Perdagangan dan Jasa Perorangan	25	2.100.000
Pemerintahan	15	3.800.000
Pendidikan dan Kesehatan	10	4.000.000
Industri dan Konstruksi	8	3.200.000
Lainnya	7	2.900.000

Sektor pertanian dan perdagangan menyerap 60 persen tenaga kerja, tetapi hanya menghasilkan pendapatan di bawah rata-rata kota. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk bekerja di sektor dengan produktivitas rendah, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi sulit dirasakan secara luas. Tingginya konsentrasi tenaga kerja pada sektor pertanian dan perdagangan tradisional berimplikasi pada rendahnya produktivitas dan pendapatan rata-rata pekerja. Literatur pembangunan menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja merupakan prasyarat utama agar pertumbuhan ekonomi dapat bersifat inklusif dan berkelanjutan, terutama di daerah yang masih bergantung pada sektor primer ([W. Bank, 2022](#)).

3.5.2 Kelembagaan dan Ekosistem UMKM

Hasil pendataan Dinas Koperasi dan UKM Kota Sungai Penuh tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7.000 pelaku UMKM aktif, dengan lebih dari 80 persen di antaranya masih berada pada skala usaha mikro dan beroperasi dengan keterbatasan modal. Struktur UMKM yang didominasi oleh usaha mikro ini mencerminkan rendahnya kapasitas akumulasi usaha serta terbatasnya kemampuan untuk melakukan ekspansi produksi dan peningkatan nilai tambah. Dari sisi kelembagaan, sebagian besar pelaku UMKM belum terhubung secara memadai dengan lembaga pembiayaan formal, baik melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan berbasis syariah. Keterbatasan akses pembiayaan ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, tetapi juga oleh lemahnya kelengkapan administrasi usaha, seperti pencatatan keuangan dan legalitas usaha, yang menjadi prasyarat utama dalam sistem pembiayaan formal.

Selain itu, tingkat integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital dan jaringan perdagangan yang lebih luas masih relatif rendah. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan pola pemasaran konvensional dengan jangkauan pasar terbatas pada wilayah lokal. Kondisi ini menghambat kemampuan UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan volume penjualan, serta membangun keterkaitan yang berkelanjutan dengan sektor perdagangan modern dan rantai pasok. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, keterbatasan kelembagaan dan ekosistem UMKM tersebut berdampak langsung pada peran UMKM dalam struktur perekonomian lokal. UMKM belum mampu berfungsi secara optimal sebagai penghubung antara sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku dan sektor perdagangan sebagai penggerak distribusi dan pemasaran. Akibatnya, potensi UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan belum sepenuhnya terealisasi.

3.5.3 Keterbatasan Nilai Tambah dan Hilirisasi Pertanian

Meskipun sektor pertanian merupakan salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh, nilai tambah yang dihasilkan dari sektor ini masih relatif rendah. Struktur produksi pertanian daerah masih didominasi oleh penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah, khususnya untuk komoditas unggulan seperti padi, sayuran dataran tinggi, kopi, dan cabai. Pola ini mencerminkan keterbatasan kemampuan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan diferensiasi produk.

Rendahnya tingkat hilirisasi pertanian tidak terlepas dari keterbatasan fasilitas pengolahan dan agroindustri di tingkat lokal. Minimnya unit pengolahan pascapanen menyebabkan hasil pertanian sebagian besar langsung dipasarkan tanpa melalui proses sortasi, pengemasan, atau pengolahan lanjutan yang dapat meningkatkan kualitas dan harga jual. Selain itu, adopsi teknologi pascapanen masih terbatas, sehingga tingkat kehilangan hasil (*post-harvest losses*) relatif tinggi dan efisiensi rantai pasok belum optimal. Rendahnya tingkat pengolahan hasil pertanian menyebabkan sebagian besar komoditas unggulan daerah dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang terbatas, sehingga sektor pertanian belum berperan optimal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah ([A. D. Bank, 2021](#)). Berdasarkan hasil analisis situasi di atas, akar masalah rendahnya pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Sungai Penuh dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 6. Identifikasi akar masalah

Bidang	Akar Masalah Utama	Dampak
Struktur Ekonomi	Ketergantungan tinggi pada sektor primer dan perdagangan tradisional	Pertumbuhan ekonomi stagnan dan rentan fluktuasi
Produktivitas Tenaga Kerja	Rendahnya kemampuan SDM dan akses teknologi	Upah rendah, daya saing lemah
Infrastruktur Ekonomi	Jalan produksi, pasar, dan logistik terbatas	Biaya distribusi tinggi, efisiensi rendah
Kelembagaan UMKM	Lemahnya akses pembiayaan dan digitalisasi	UMKM tidak tumbuh signifikan
Nilai Tambah Pertanian	Minimnya pengolahan hasil pertanian	Nilai ekonomi pertanian rendah
Koordinasi Lintas Sektor	Program ekonomi masih parsial antar-OPD	Tidak terjadi integrasi kebijakan pertanian–perdagangan

3.6 Evaluasi Kebijakan Yang Ada

3.6.1 Kebijakan dan Program Ekonomi yang Telah Dijalankan

Selama periode RPJMD 2021–2026, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian, perdagangan,

serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program-program tersebut tersebar di beberapa OPD, di antaranya:

Tabel 7. Program pembangunan ekonomi daerah menurut perangkat daerah

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan Utama	Fokus Program
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	a. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura b. Pengembangan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan keluarga c. Bantuan sarana produksi (benih, pupuk, alat mesin pertanian) d. Pelatihan dan penyuluhan petani.	Peningkatan produksi, produktivitas, dan kapasitas petani serta penguatan ketahanan pangan daerah.
2	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	a. Pengembangan pasar rakyat dan revitalisasi infrastruktur perdagangan. b. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan. c. Fasilitasi pembiayaan KUR, pembentukan koperasi syariah, dan pendampingan usaha kecil.	Penguatan ekosistem perdagangan lokal, koperasi, dan UMKM untuk meningkatkan akses pasar dan pembiayaan.
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	a. Penyusunan rencana strategis ekonomi lokal (2022–2024). b. Sinkronisasi program lintas sektor melalui Musrenbang tematik ekonomi.	Koordinasi perencanaan dan integrasi program pembangunan ekonomi lintas OPD.
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan produksi pertanian serta akses antarkecamatan. b. Penyediaan infrastruktur dasar ekonomi (jembatan, drainase, dan pasar).	Penyediaan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas wilayah.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh telah berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, namun masih bersifat sektoral dan belum membentuk integrasi rantai nilai antara pertanian dan perdagangan. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Sungai Penuh selama periode 2021–2024 menunjukkan adanya upaya aktif pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui berbagai program sektoral. Untuk melihat arah dan capaian pelaksanaan kebijakan tersebut, Tabel 8 menyajikan ringkasan program pembangunan ekonomi daerah, alokasi anggaran, serta capaian pelaksanaannya selama periode 2021–2024.

Tabel 8. Ringkasan program pembangunan ekonomi daerah dan capaian pelaksanaannya tahun 2021–2024

Tahun	Perangkat Daerah	Program Utama	Alokasi Anggaran (Miliar Rp)	Capaian Fisik (%)	Catatan
2021	Dinas Pertanian	Peningkatan Produksi Pangan	22,5	98	Output tinggi, tetapi produktivitas stagnan
2022	Dinas Perdagangan & UKM	Revitalisasi Pasar dan Pembinaan UMKM	18	96	Revitalisasi pasar belum berdampak besar pada omzet
2023	Dinas Pertanian	Bantuan Sarana Produksi Petani	25,4	97	Belum diikuti dengan pelatihan teknologi

2024	Dinas Koperasi & UKM	Pelatihan Digitalisasi dan Pembiayaan UMKM	12,7	90	Peserta terbatas, adopsi digital rendah
------	----------------------	--	------	----	---

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sungai masih bersifat sektoral dan belum membentuk integrasi rantai nilai antara pertanian dan perdagangan. Hal ini tercermin dari tingginya capaian fisik pelaksanaan program pada masing-masing perangkat daerah yang pada umumnya berada di atas 90 persen, namun belum diikuti oleh peningkatan kinerja ekonomi riil secara signifikan.

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 8, program pembangunan ekonomi daerah masih dilaksanakan secara terpisah antar sektor dan antar perangkat daerah, tanpa desain integrasi rantai nilai yang jelas antara sektor pertanian dan perdagangan. Pada tahun 2021 dan 2023, misalnya, Dinas Pertanian memfokuskan program pada peningkatan produksi dan pemberian sarana produksi petani dengan capaian fisik yang tinggi. Namun, program tersebut belum diikuti oleh penguatan aspek hilirisasi, pengolahan, dan akses pasar, sehingga peningkatan output tidak secara signifikan mendorong produktivitas dan nilai tambah ekonomi.

Di sisi lain, program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2022 dan 2024 lebih diarahkan pada revitalisasi pasar, pembinaan UMKM, serta digitalisasi usaha. Meskipun realisasi fisik program tergolong tinggi, dampaknya terhadap peningkatan omzet dan perluasan pasar UMKM masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM dan pedagang belum terhubung secara kuat dengan basis produksi pertanian lokal sebagai sumber bahan baku utama.

3.6.2 Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan yang Ada

Dari hasil evaluasi, beberapa kelemahan kebijakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

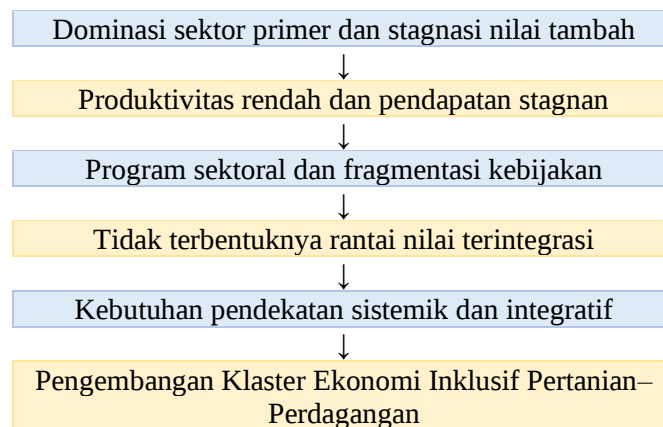
Tabel 9. Ringkasan evaluasi kritis kebijakan pembangunan ekonomi daerah

Aspek	Kelemahan Utama	Dampak
Perencanaan Sektoral	Program antar-OPD belum terintegrasi dalam satu sistem ekonomi daerah	Tumpang tindih kegiatan dan duplikasi anggaran
Orientasi Output	Program masih menekankan output fisik, bukan outcome ekonomi	Hasil tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan
Kapasitas SDM dan Kelembagaan	Pendampingan petani dan UMKM belum berkelanjutan	Produktivitas rendah dan daya saing lemah
Infrastruktur Ekonomi	Revitalisasi pasar tanpa dukungan logistik dan transportasi	Efektivitas distribusi rendah
Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi	Rendahnya adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha	Akses pasar terbatas, terutama di daerah rural

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 9, salah satu kelemahan utama terletak pada masih dominannya pendekatan perencanaan sektoral. Program yang dirancang dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah belum terintegrasi dalam satu kerangka sistem ekonomi daerah yang utuh. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan serta duplikasi anggaran, tanpa menghasilkan sinergi yang optimal antar sektor strategis, khususnya antara pertanian dan perdagangan. Selain itu, orientasi kebijakan pembangunan ekonomi masih cenderung menitikberatkan pada pencapaian output fisik, seperti jumlah kegiatan, peserta, atau infrastruktur yang dibangun, dibandingkan dengan outcome ekonomi yang terukur, seperti peningkatan pendapatan pelaku usaha, perluasan lapangan kerja, atau pengurangan kemiskinan. Akibatnya, meskipun capaian fisik program relatif tinggi, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan juga menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan. Pendampingan terhadap petani dan pelaku UMKM umumnya bersifat temporer dan belum berkelanjutan, sehingga peningkatan keterampilan, produktivitas, dan daya saing usaha tidak berlangsung secara konsisten. Kelemahan ini diperkuat oleh belum optimalnya peran kelembagaan pendukung, seperti koperasi dan asosiasi usaha, dalam mengawal proses peningkatan kapasitas pelaku ekonomi lokal. Dari sisi infrastruktur ekonomi, kebijakan revitalisasi pasar yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya didukung oleh penguatan sistem logistik dan transportasi. Ketiadaan fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, sistem distribusi yang efisien, dan konektivitas antar wilayah menyebabkan efektivitas distribusi produk pertanian dan UMKM masih rendah, terutama untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga masih menghadapi tantangan signifikan. Rendahnya tingkat adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha, khususnya di wilayah perdesaan, membatasi akses pasar dan informasi harga. Kondisi ini menghambat integrasi pelaku usaha kecil ke dalam jaringan perdagangan modern dan memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha yang telah terhubung secara digital dan yang masih beroperasi secara konvensional. Untuk memperjelas alur hubungan antara fenomena ekonomi, akar masalah, evaluasi kebijakan, dan kebutuhan intervensi baru, berikut disajikan diagram alur logika kebijakan



Gambar 1. Alur Logika Kebijakan Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Sungai Penuh

3.7 Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan periode 2021–2024, terdapat sejumlah peluang perbaikan yang dapat menjadi dasar perumusan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan sektoral antar-perangkat daerah belum membentuk keterkaitan fungsional dalam rantai nilai pertanian–perdagangan. Selain itu, rendahnya integrasi kelembagaan, terbatasnya adopsi digitalisasi UMKM, serta belum optimalnya dukungan infrastruktur logistik menjadi faktor pembatas efektivitas kebijakan.

Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bertujuan meningkatkan output sektoral, tetapi juga membangun integrasi sistem ekonomi daerah secara menyeluruh. Alternatif ini disusun untuk menjawab akar permasalahan struktural, yaitu stagnasi nilai tambah, konsentrasi tenaga kerja berproduktivitas rendah, serta fragmentasi kebijakan lintas sektor, seperti pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Alternatif kebijakan

Alternatif Kebijakan	Deskripsi Singkat	Langkah Kunci	Kelebihan	Kelemahan
Alternatif 1. Revitalisasi Infrastruktur	Peningkatan kualitas dan jangkauan	a. Peningkatan dan pemeliharaan pasar rakyat di	a. Dampak langsung terhadap	a. Membutuhkan investasi besar dan waktu

Ekonomi Lokal	infrastruktur ekonomi untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan aktivitas perdagangan.	seluruh kecamatan. b. Pembangunan fasilitas logistik pertanian di sentra produksi. c. Pengembangan sistem transportasi barang hasil pertanian yang efisien.	efisiensi distribusi barang b. Mendorong peningkatan harga jual hasil pertanian dan aktivitas perdagangan lokal c. Menciptakan lapangan kerja di sektor jasa logistik dan pasar.	implementasi relatif panjang. b. Efektivitas bergantung pada koordinasi lintas OPD dan pemeliharaan pasca pembangunan.
Alternatif 2. Penguatan Rantai Nilai Pertanian (<i>Value chain</i>)	Penguatan keterkaitan antarpelaku ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian lokal.	a. Pembentukan klaster komoditas unggulan (padi, sayur dataran tinggi, kopi). b. Pengembangan koperasi tani dan unit usaha pengolahan hasil pertanian. c. Fasilitasi kemitraan antara petani dan pedagang grosir (<i>offtaker</i>).	a. Meningkatkan nilai tambah dan harga produk pertanian b. Membangun sinergi antara produksi dan perdagangan c. Mengurangi ketergantungan pada pasar luar daerah.	a. Memerlukan waktu untuk membangun kelembagaan dan kemitraan yang solid. b. Risiko keberlanjutan tanpa dukungan regulasi dan pembinaan jangka panjang.
Alternatif 3. Akselerasi Digitalisasi dan Keuangan Inklusif bagi UMKM	Pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM.	a. Pelatihan digital marketing dan keuangan digital (QRIS, e-commerce). b. Pembentukan Digital Business Center di pasar rakyat dan sentra UMKM c. Integrasi data UMKM dan pembiayaan mikro berbasis syariah.	a. Memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. b. Biaya implementasi relatif lebih rendah dibanding infrastruktur fisik. c. Memperluas akses modal bagi pelaku ekonomi mikro.	a. Literasi digital pelaku usaha masih terbatas. b. Memerlukan dukungan jaringan internet dan pendampingan berkelanjutan.
Alternatif 4. Pengembangan Klaster Ekonomi Inklusif Pertanian–Perdagangan	Integrasi sektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan infrastruktur dalam satu klaster ekonomi produktif	a. Pemetaan potensi komoditas unggulan per wilayah. b. Pembentukan <i>economic hub</i> yang mengintegrasikan	a. Mendorong pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. b. Memperkuat sinergi multipihak	a. Memerlukan perencanaan spasial dan koordinasi lintas sektor yang kuat. b. Membutuhkan dukungan

	berbasis wilayah.	sentra pertanian, pasar induk, dan koperasi c. Dukungan pembiayaan, promosi, dan inovasi produk berbasis klaster.	(pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat). c. Memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.	kebijakan lintas tahun anggaran.
--	-------------------	--	--	----------------------------------

Masing-masing alternatif dapat dinilai secara objektif untuk mengidentifikasi kebijakan yang paling strategis, berkelanjutan, dan relevan dengan kapasitas serta arah pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel 11 sebagai dasar penetapan alternatif kebijakan yang direkomendasikan.

Tabel 11 Matriks perbandingan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi daerah

Aspek Penilaian	Alternatif 1: Infrastruktur Ekonomi	Alternatif 2: Rantai Nilai Pertanian	Alternatif 3: Digitalisasi UMKM	Alternatif 4: Klaster Ekonomi Inklusif
Fokus Utama	Perbaikan sarana fisik & logistik	Nilai tambah & integrasi pertanian	Pasar digital & akses keuangan	Sinergi antar sektor & wilayah
Biaya Implementasi	Tinggi	Sedang	Rendah–Sedang	Sedang–Tinggi
Waktu Dampak	Jangka menengah–panjang	Jangka menengah	Jangka pendek	Jangka panjang
Kelembagaan Diperlukan	OPD, swasta, PUPR	Koperasi, Dinas Pertanian & Perdagangan	Dinas UKM, Kominfo	Bappeda, lintas OPD
Potensi Inklusivitas	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
Tingkat Risiko	Menengah	Menengah	Rendah–Menengah	Menengah–Tinggi

3.8 Rekomendasi Kebijakan

3.8.1 Prinsip Umum Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan hasil analisis fenomena, evaluasi kebijakan yang ada, serta perbandingan alternatif kebijakan. Kebijakan yang direkomendasikan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menjadikan sektor pertanian dan perdagangan sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Prinsip dasar yang melandasi rekomendasi ini adalah:

- 1). Integrasi antar sektor dan wilayah — kebijakan tidak berjalan parsial, melainkan saling memperkuat antara pertanian, perdagangan, dan UMKM.
- 2). Peningkatan nilai tambah ekonomi lokal — fokus pada pengolahan, inovasi produk, dan penguatan rantai nilai (*value chain*).
- 3). Inklusivitas dan pemerataan kesejahteraan — memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan petani.
- 4). Kolaborasi multipihak — pelibatan pemerintah daerah, swasta, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam satu ekosistem pembangunan ekonomi daerah.

3.8.2 Strategi Utama yang Direkomendasikan

Berdasarkan hasil analisis dan matriks perbandingan alternatif kebijakan, Alternatif 4 yaitu Pengembangan Klaster Ekonomi Inklusif Pertanian–Perdagangan dipilih sebagai strategi utama karena secara langsung menjawab seluruh akar masalah yang telah diidentifikasi, yaitu fragmentasi kebijakan antar-OPD, rendahnya nilai tambah sektor pertanian, lemahnya integrasi UMKM dalam rantai pasok, serta stagnasi struktur ekonomi daerah. Dibandingkan alternatif lainnya yang bersifat parsial, pendekatan klaster menawarkan solusi sistemik dan terintegrasi yang mampu menghubungkan sisi produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran dalam satu kerangka kebijakan ekonomi daerah yang utuh.

Strategi Utama: Pengembangan Klaster Ekonomi Inklusif Pertanian–Perdagangan

Strategi ini berfokus pada pembentukan klaster ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan, dengan pendekatan *integrated value chain*, yaitu menghubungkan produksi pertanian → pengolahan → distribusi → pemasaran.

Klaster ekonomi inklusif ini berfungsi sebagai wadah integrasi aktor ekonomi lintas sektor, dengan pembagian peran yang jelas sebagai berikut:

- 1). Petani dan Kelompok Tani
Berperan sebagai penyedia bahan baku utama melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dalam skema klaster, petani didorong untuk tidak hanya berorientasi pada volume produksi, tetapi juga pada standar mutu dan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan oleh sektor hilir.
- 2). UMKM dan Koperasi Lokal
Berfungsi sebagai penggerak utama pengolahan dan distribusi produk pertanian. UMKM diarahkan untuk mengembangkan kegiatan pengolahan bernilai tambah (misalnya pengemasan, pengolahan setengah jadi, atau produk olahan), sementara koperasi berperan sebagai agregator produksi, penjamin pasokan, serta penguat posisi tawar petani dan pelaku usaha kecil.
- 3). Pedagang, Distributor, dan Pelaku *E-Commerce*
Berperan dalam memperluas akses pasar produk lokal melalui jaringan perdagangan konvensional maupun digital.
- 4). Pemerintah Daerah
Berperan sebagai *enabler* dan regulator, bukan pelaku langsung kegiatan ekonomi. Dukungan pemerintah daerah difokuskan pada penyediaan fasilitasi kebijakan, penyederhanaan regulasi, penguatan infrastruktur pendukung, serta akses pembiayaan dan pendampingan usaha.

3.8.3 Arah Implementasi Strategi

1. Jangka Pendek (1–2 Tahun)

Fokus: Penguatan dasar kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Langkah-langkah:

- Pemetaan komoditas unggulan pertanian dan potensi perdagangan per kecamatan.
- Revitalisasi pasar daerah dan pembangunan fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
- Penetapan kebijakan koordinasi lintas sektor melalui regulasi daerah untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan program pertanian, perdagangan, dan UMKM.
- Pengembangan koperasi produksi dan unit agroindustri skala kecil sebagai dasar penguatan nilai tambah.
- Akselerasi digitalisasi UMKM melalui integrasi sistem pemasaran digital dan perluasan akses pembiayaan inklusif.

2. Jangka Menengah (3–5 Tahun)

Fokus: Pembentukan dan penguatan klaster ekonomi daerah.

Langkah-langkah:

- Pengembangan klaster pertanian–perdagangan di setiap kecamatan.
- Pendirian koperasi produksi dan unit pengolahan hasil pertanian (agroindustri kecil).
- Implementasi sistem *e-commerce* daerah untuk produk lokal (terintegrasi dengan KUR Syariah).
- Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan manajemen bisnis bagi UMKM.

- Wali Kota Sungai Penuh menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kluster Ekonomi Inklusif Pertanian–Perdagangan sebagai payung hukum integrasi kebijakan lintas OPD
- Pemerintah Kota Sungai Penuh mengarahkan kebijakan penganggaran daerah untuk mendukung kluster ekonomi inklusif melalui integrasi APBD, DAK tematik, CSR, dan skema KPBU.

3. Jangka Panjang (5–10 Tahun)

Fokus: Transformasi struktur ekonomi menuju ekonomi inklusif dan berdaya saing.

Langkah-langkah:

- Penguatan sistem rantai nilai pertanian–perdagangan berbasis teknologi.
- Integrasi kluster ekonomi lokal dengan jaringan regional (Kerinci, Jambi, dan Sumatera Barat).
- Peningkatan ekspor produk unggulan pertanian olahan.
- Pembentukan *Pusat Inovasi Ekonomi Daerah (Regional Innovation Hub)* untuk mengembangkan produk berbasis potensi lokal.
- Implementasi kebijakan fiskal daerah yang pro-UMKM (insentif pajak dan retribusi).

Agar strategi di atas dapat berjalan efektif, dibutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan, sebagai berikut:

Tabel 12 Dukungan kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan dalam implementasi kebijakan ekonomi inklusif

Komponen	Dukungan yang Diperlukan	Penanggung Jawab
Kelembagaan	Pembentukan <i>Tim Koordinasi Ekonomi Inklusif</i> di bawah Bappeda	Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas UKM
Regulasi	Penyusunan <i>Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kluster Ekonomi Inklusif</i>	Bagian Hukum Setda, Bappeda
Pembiayaan	Integrasi dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), CSR, dan skema KPBU	BPKAD, DPRD, Swasta
Kemitraan	Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga keuangan	Bappeda, Dinas Koperasi & UKM, OJK
Monitoring dan Evaluasi	Penguatan sistem Monev berbasis data sektoral BPS	Bappeda, Diskominfo

3.9 Dampak dan Manfaat yang Diharapkan

Pelaksanaan strategi pengembangan kluster ekonomi inklusif pertanian–perdagangan diharapkan memberikan dampak ekonomi dan sosial secara bertahap, sebagaimana dirangkum pada Tabel 13. Dampak tersebut mencakup peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan partisipasi UMKM pada jangka pendek, peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja pada jangka menengah, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, penurunan ketimpangan, dan pengurangan kemiskinan pada jangka panjang.

Tabel 13 Dampak dan manfaat kebijakan ekonomi inklusif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang

Horizon Waktu	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial
Jangka Pendek (1–2 tahun)	Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan lokal	Meningkatnya partisipasi UMKM dalam ekonomi daerah
Jangka Menengah (3–5 tahun)	Produktivitas pertanian meningkat 20–30%	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor riil meningkat

Jangka Panjang (5–10 tahun)	Pertumbuhan ekonomi >6%, Rasio Gini $\leq 0,32$	Pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan hingga $\leq 3,5\%$
-----------------------------	--	---

4. Kesimpulan

4.1. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya inklusif karena dominasi sektor pertanian dan perdagangan belum diikuti oleh peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, serta integrasi rantai nilai ekonomi daerah. Struktur ekonomi yang masih tradisional, konsentrasi tenaga kerja pada sektor berproduktivitas rendah, serta fragmentasi kebijakan antar-perangkat daerah menyebabkan manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara optimal. Pengembangan Klaster Ekonomi Inklusif Pertanian–Perdagangan merupakan strategi yang paling relevan untuk menjawab permasalahan struktural tersebut. Namun, implementasinya harus diawali dengan langkah jangka pendek yang konkret dan segera dilaksanakan, yaitu pembentukan tim koordinasi lintas OPD berbasis outcome, percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan pascapanen dan pengolahan skala mikro, serta integrasi digitalisasi dan pembiayaan UMKM berbasis rantai nilai. Intervensi cepat ini penting untuk mencegah stagnasi nilai tambah dan mempercepat dampak ekonomi riil.

Secara sosial, integrasi pertanian dan perdagangan berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperluas kesempatan kerja sektor riil, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dari perspektif keberlanjutan, kebijakan harus didukung konsistensi regulasi, integrasi perencanaan lintas sektor, pengelolaan fiskal yang terukur, serta sistem monitoring berbasis kinerja agar tidak kembali bersifat sektoral dan jangka pendek. Dengan demikian, transformasi menuju ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing hanya dapat dicapai melalui pendekatan klaster yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

4.2. Limitasi

Policy paper ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan di Kota Sungai Penuh. Pertama, analisis kebijakan yang disusun terutama bertumpu pada data sekunder resmi, seperti data Badan Pusat Statistik dan dokumen perencanaan daerah. Keterbatasan ini menyebabkan kajian belum sepenuhnya menangkap kondisi faktual dan dinamika lapangan yang dihadapi petani, pedagang, dan pelaku UMKM, khususnya terkait hambatan operasional, pola rantai pasok, serta respons terhadap program pemerintah daerah.

Kedua, *policy paper* ini lebih menekankan pada analisis struktural dan evaluasi kebijakan makro daerah, sehingga belum menguraikan secara rinci aspek mikro implementasi kebijakan, seperti kesiapan kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa, kapasitas sumber daya manusia aparatur pelaksana, serta kemampuan fiskal daerah dalam mendukung kebijakan penguatan sektor pertanian dan perdagangan secara berkelanjutan. Ketiga, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan bersifat strategis dan jangka menengah–panjang, sehingga belum seluruhnya dilengkapi dengan estimasi biaya, skema pendanaan rinci, serta analisis risiko implementasi pada setiap program prioritas.

4.3 Saran dan Studi Lanjutan

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Sungai Penuh disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih operasional guna mendukung implementasi kebijakan pembangunan ekonomi inklusif. Studi lanjutan dapat difokuskan pada pemetaan rantai nilai komoditas unggulan daerah secara detail, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal di setiap kecamatan.

Selain itu, diperlukan kajian mikro berbasis lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata petani, pedagang, dan UMKM, termasuk aspek akses permodalan, adopsi teknologi, digitalisasi, serta kelembagaan ekonomi lokal. Hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar perumusan program intervensi yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi lokal. Studi lanjutan juga dapat diarahkan pada analisis kesiapan kelembagaan dan koordinasi lintas perangkat daerah di

Kota Sungai Penuh, guna memastikan integrasi kebijakan sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM berjalan efektif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga realistis dan implementatif dalam konteks kapasitas dan kondisi fiskal daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh atas dukungan data, informasi, dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan *policy paper* ini dan juga berbagai pihak yang telah memberikan masukan, diskusi, dan pandangan konstruktif selama penyusunan *policy paper* ini. Penulis menyadari bahwa *policy paper* ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, seluruh pandangan, analisis, dan rekomendasi yang disajikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi institusi tempat penulis bekerja.

Referensi

- Andriansyah, Nurwanda, A., & Rifai, B. (2023). Structural Change and Regional Economic Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 91-117. doi:<https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1914320>
- Ayu Az Zahra, D., & Ajija, S. R. (2023). The Effect of Financial Inclusion on Inclusive Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(1), 55-67. doi:<https://doi.org/10.20473/jiet.v8i1.45426>
- Bank, A. D. (2021). Asian Development Outlook 2021.
- Bank, A. D. (2023). Asian Development Outlook 2023.
- Bank, W. (2022). Finance For An Equitable Recovery.
- Chizaryfard, A., Trucco, P., & Nuur, C. (2021). The transformation to a circular economy: framing an evolutionary view. *Journal of Evolutionary Economics*, 31(2), 475-504. doi:<https://doi.org/10.1007/s00191-020-00709-0>
- Chola Kazembe, A., Kwelese Chomachoma, B., Ongo Nkoa, B. E., & Kelly, A. M. (2026). Fiscal revenue mobilization and structural transformation in Sub-Saharan Africa: a panel data analysis. *Cogent Economics & Finance*, 14(1), 2611621. doi:<https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2611621>
- Christiaensen, L., Demery, L., & Kuhl, J. (2011). The (evolving) role of agriculture in poverty reduction—An empirical perspective. *Journal of Development Economics*, 96(2), 239-254. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.10.006>
- Dethier, J.-J., & Effenberger, A. (2012). Agriculture and development: A brief review of the literature. *Economic Systems*, 36(2), 175-205. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2011.09.003>
- Elis Anita Farida, M. F., Tri Dina Fitria, Mochammad Arif Firdaus. (2025). Strategi Inklusif untuk Penguatan UMKM dan Optimalisasi Peran Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Digital. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*. doi:<https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1159>
- Ernan Rustiadi, A. N. A., Bambang Juanda, Hania Rahma. (2025). Determination of Leading Subsectors for Inclusive and Sustainable Economic Development Using the Promethee Method Case Study on the Prospective New Autonomous Region of North Sukabumi Regency. *Jurnal Bina Praja*. doi:<https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025-2556>
- Gustriani, Asngari, I., Suhel, & Yulianita, A. (2023). Determinants of Financial Inclusion for MSMEs: Evidence from Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 26(2), 260-270. doi:<https://doi.org/10.14414/jebav.v26i2.3381>
- Haile, D. (2025). The effect of agricultural productivity on poverty: what does meta-regression analyses reveal? *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2580057. doi:<https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2580057>
- Halim, P. R., Yusuf, A. A., Sumner, A., & Purnagunawan, R. M. (2025). Structural transformation and regional inequality differential in Indonesia. *Regional Studies, Regional Science*, 12(1), 790-815. doi:<https://doi.org/10.1080/21681376.2025.2565318>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., Lestari, S., & Zein, A. S. (2023). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah,

- Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 3(1), 41-49. doi:<https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i1.2407>
- Henson, R. W. (2025). Economic Transformation, Structural Change, and Inclusive Growth in The Philippines: A Literature Review. *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 6(4), 13-22. doi:<https://doi.org/10.47616/jamrems.v6i4.667>
- Jui, J. R. (2025). Agriculture, Structural Transformation, and Economic Growth in Bangladesh: Trends, Challenges, and Policy Implications. *Journal of Scientific Reports*, 10(1), 196-209. doi:<https://doi.org/10.58970/JSR.1124>
- Karimu, S., & Abubakar, A. B. (2025). Income inequality, structural change, and inclusive economic growth. *Oxford Development Studies*, 53(3), 305-325. doi:<https://doi.org/10.1080/13600818.2025.2507257>
- Kusumawardhani, Z. H. N., Wulandari, S., Amriadi, A., Kasmirandi, K., & Abbas, S. A. (2025). Strategi Penguatan UMKM Industri Kreatif untuk Mewujudkan Ekonomi Inklusif di Daerah Non-Metropolitan: Studi di Kab. Soppeng. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1373-1379. doi:<https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.15038>
- Mamman, S. O., & Sohag, K. (2023). Inclusive growth and structural transformation: The role of innovation and digitalisation spillover. *Экономика региона*, 19(3), 598-611. doi:<https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-3-1>
- Muhamad Amir Ariandi, M. R. (2025). Pendampingan Strategi Pemasaran pada UMKM untuk Meningkatkan Efektivitas Penjualan Berbasis Digital Marketing. *Jurnal Nusantara Mengabdi (JNM)*. doi:<https://doi.org/10.35912/jnm.v4i3.4449>
- Nasihin, M. N. A. K., Feryani, D., Dwiyanti, D., Azahrotussholikha, N., Sundari, A., Syaikudin, A. Y., & Rozi, A. F. (2025). Pemberdayaan Desa Takerharjo via Pertanian Berkelanjutan dan Edukasi Kesehatan. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 4(2), 51-62. doi:<https://doi.org/10.35912/jnm.v4i2.4394>
- OECD. (2023). OECD Regional Outlook 2023. doi:<https://doi.org/10.1787/92cd40a0-en>
- Padmayoni, K. S., Widanti, N. P. T., & Dewi, N. D. U. (2025). Peran Strategis TPID Klungkung dalam Pengendalian Harga Pangan Pokok Daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 4(2), 107-119. doi:<https://doi.org/10.35912/jastaka.v4i2.4443>
- Purnamasari, V., Seprillina, L., Qurrata, V. A., Sarmidi, T., & Cahayati, N. (2025). Enhancing Financial Inclusion in the MSME Sector: An Investigation of Fintech Adoption in Indonesia through Structural Equation Modeling. *International Journal of Islamic Business and Economics*. doi:<https://doi.org/10.28918/ijibec.v9i1.11>
- Putri, L. A., Suningsih, S., Karim, M., & Hendrawaty, E. (2023). Pengembangan Ide Bisnis BUMDES dan UMKM di Desa Purworejo, Pesawaran, Lampung. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 3(1), 21-30. doi:<https://doi.org/10.35912/jnm.v3i1.2621>
- Rauniyar, G., & Kanbur, R. (2009). Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literature. *Asian Development Bank*.
- Sen, K., Sumner, A., & Yusuf, A. (2020). Double dividends and mixed blessings: structural transformation, income inequality and employment dynamics (Vol. 56, pp. 1638-1642): Taylor & Francis.
- Setyohadi, J. S., PD, M. A., & Tjitrosuanto, S. (2025). Perkembangan Kebijakan Inklusif terhadap Ekonomi Kerakyatan: Review Literatur terhadap Praktik Global dan Implementasinya di Indonesia. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 913-920. doi:<https://doi.org/10.63822/eq3wry81>
- Suci, R., Dilla Amelia, R., Muhammad, I., & Lokot Muda, H. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 158-166. doi:<https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183>
- Wahyudi, H., & Silpayana, S. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(2), 111-124. doi:<https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1408>
- Wiranata, T., Efendi, B., & Sari, W. I. (2024). Analysis of Financial Inclusion and The Number of MSMEs To GDP In Indonesia. *International Journal of Management, Economic and Accounting*. doi:<https://doi.org/10.61306/ijmea>
- Wu, C., & Cai, H. (2025). Structural change, elasticity of substitution, and growth. *Journal of Applied Economics*, 28(1). doi:<https://doi.org/10.1080/15140326.2025.2572104>

- Yulya Ammi, H., Putri, A., Aldi, H., & Fahrur, R. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53-62. doi:<https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>
- Yusuf, A. A., Anglingkusumo, R., & Sumner, A. (2021). A direct test of Kuznets in a developing economy: a cross-district analysis of structural transformation and inequality in Indonesia. *Regional Studies, Regional Science*, 8(1), 184-206. doi:<https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1924850>